

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk dapat menciptakan suatu bangsa yang sejahtera, negara membutuhkan dana yang tidak sedikit guna membiayai berbagai keperluan pembangunan dalam arti yang luas. Pemasukan dana yang diterima oleh negara diperoleh dari 2 (dua) sumber yaitu penerimaan dalam negeri dan bantuan luar negeri. Penerimaan dalam negeri diperoleh dari penerimaan minyak dan gas, penerimaan pajak dan bukan pajak. Sedangkan bentuk bantuan luar negeri adalah bantuan program dan bantuan proyek. Tentu saja dalam hal penerimaan yang akan lebih diutamakan adalah penerimaan yang berasal dari dalam negeri. Dengan demikian penerimaan yang berasal dari dalam negeri disamping dimaksudkan untuk mendukung peningkatan laju pembangunan juga dimaksudkan untuk secara bertahap memperbaiki struktur sumber pembiayaan negara dengan mengurangi ketergantungannya pada sumber dana luar negeri. Sumber penerimaan dana dalam negeri diperoleh dari pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mengurangi ketergantungan aliran dana yang diperoleh dari pemerintah pusat maka daerah harus mampu menggali sumber-sumber potensial yang berasal dari daerahnya sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa yang termasuk sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
 - 1) Hasil Pajak Daerah
 - 2) Hasil Retribusi Daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan, dan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

Penerimaan dari segi pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara dan daerah karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Pajak juga memegang peranan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional dan pembangunan di daerah-daerah. Hal ini terbukti dengan semakin besarnya penerimaan negara dan daerah dari sektor pajak dari tahun ke tahun.

Dengan adanya Otonomi Daerah maka pembangunan nasional yang pada dasarnya merupakan pusat dari pembangunan di daerah-daerah telah diarahkan untuk tercapainya pemerataan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka pemerintah dan masyarakat itu mengelola sumber daya yang dimiliki daerah yang tersedia secara bersama-sama dengan pola kemitraan untuk tercapainya pembangunan seperti yang diharapkan oleh

masyarakat untuk itu diperlukan peningkatan partisipasi dari seluruh rakyat. Setiap daerah oleh pemerintah pusat diberi hak otonom yang memberikan keleluasaan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan serta mengatur dan membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerahnya.

Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah. Peran Pemerintah Pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah-langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri

sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan Pemerintah Daerah tergantung pada peranan PAD. Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun perlu digaris bawahi bahwa tidak semua daerah memiliki kekayaan alam. Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang dimiliki akan semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang. Kiranya dengan asas ini, pemerintah perlu memberikan jalan keluar agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata.

Dengan demikian siap sudah bagi pemerintah pusat untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang meletakkan peranan daerah pada

posisi yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Peranan pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang utama disamping dana perimbangan yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumber daya alam akan sangat menentukan kekuatan dari APBD. Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah antara lain untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja guna mewujudkan tujuan tersebut pemerintah daerah dan masyarakat secara bersama-sama harus memiliki inisiatif dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dan masyarakat berdasarkan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang dimiliki sehingga dapat merancang dan membangun perekonomian daerah. Potensi daerah yang dimiliki dapat dikembangkan sehingga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah pada sektor-sektor yang produktif. Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan yang sampai saat ini mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk menggali sumber dana tersebut diperlukan suatu perencanaan yang matang guna menghindari kekeliruan dalam melakukan prediksi pendapatan dimasa yang akan datang sehingga tidak realitisnya anggaran pendapatan.

Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kota budaya, pariwisata dan pelajar. Dan memiliki 5 Kab/Kota yang terdiri dari Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulonprogo, Kab. Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai potensi kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi dengan pengelolaan yang baik sehingga dapat memberikan

kontribusi terhadap Penerimaan PAD terutama Pajak Daerah. Penerimaan daerah dari bagian PAD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dll. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2001-2008 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1.
Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah
di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Milyar Rp)
Tahun 2001 s/d 2008

No	Tahun	Pajak Daerah	Pajak Kendaraan Bermotor
1	2001	123.516.267.076	53.177.830.870
2	2002	175.519.260.386	66.953.503.135
3	2003	228.143.758.510	87.824.820.800
4	2004	307.631.410.122	120.788.351.375
5	2005	360.119.663.754	149.291.828.905
6	2006	374.578.524.388	176.946.972.390
7	2007	434.898.894.141	206.659.041.270
8	2008	525.186.561.693	222.137.597.800

Sumber : DISPENDA DIY

Berdasarkan tabel di atas bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pajak Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat dari tahun 2001- 2008. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan penerimaan terbesar dalam penerimaan Pajak Daerah. Berdasarkan data empiris di atas dapat diketahui bahwa peranan penerimaan yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah cukup tinggi dan potensial di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Atas dasar rasa ingin tahu penulis dengan di dasarkan pada data empiris di atas dan ingin

mengetahui berapa besar pengaruhnya terhadap Pajak Daerah. Untuk itu saya sebagai penulis ingin meneliti dengan judul *“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor) 1993-2008”*

B. Batasan Masalah Penelitian

Untuk dapat memenuhi tujuan penelitian ini terarah pada rumusan masalah yang telah dirumuskan dan untuk menghindari timbulnya salah pengertian dan peninjauan yang terlalu luas maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
2. Jumlah Penduduk
3. Jumlah Kendaraan Bermotor

C. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 1993-2008?
2. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 1993-2008?

3. Apakah Penerimaan Jumlah Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 1993-2008?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Menganalisis pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi Pemerintahan Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini akan memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan dari informasi yang diperoleh, serta menambah pengalaman peneliti dalam bidang penelitian.

3. Bagi Dunia Pendidikan.

Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran dan untuk kemajuan pendidikan. Serta sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.